



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 886/I/XI/2015

PIMPINAN DPR SIDAK KE RUTAN PONDOK BAMBU



PIMPINAN DPR PASTIKAN
TIDAK ADA DEADLOCK
PEMBAHASAN RAPBN 2016



TAK ADA GUNANYA
INDONESIA
BERGABUNG
DENGAN TPP

Jangan lewatkan
info DPR terkini
dan live streaming
TV Parlemen di
www.dpr.go.id



PIMPINAN DPR SIDAK KE RUTAN PONDOK BAMBU



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah didampingi Pimpinan Komisi III dan VIII saat sidak ke Rutan Pondok Bambu

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah didampingi Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay, Wakil Ketua Komisi VIII Ledia H Amaliah dan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman melakukan sidak ke Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur Selasa (26/10) siang.

Menurut Fahri, kedatangan Pimpinan DPR dan rombongan adalah dalam rangka menggunakan haknya salah satunya adalah inspeksi mendadak (sidak). Kunjungan ini dilakukan karena Pimpinan menerima surat dari masyarakat warga binaan yang meminta

agar negara memberikan perhatian kepada hubungan mereka dengan anak-anaknya.

Meski berada di rutan, hubungan antara ibu dan anak itu tidak dapat dipisahkan karena bersifat fundamental. Negara tidak boleh memisahkan bahkan kalau ada yang terpaksa terpisah karena alasan ekonomi, maka negara harus mengeluarkan dana untuk menyatukan mereka.

"Ini adalah masa depan bagi mereka, masa depan bagi anak-anak dan masyarakat Indonesia. Kalau sejak dini anak itu tidak dapat pelukan ibunya

maka akan terlepas kemudian akan bergaul dengan dunia yang keras, karena mereka tidak mendapat pelukan yang membuat mereka menjadi lembut," tutur Fahri.

Itulah sebabnya lanjut Pimpinan DPR Korkesra ini, dirinya sangat tersentuh dengan isi surat ini. Kemudian dia ingin mengkonfirmasi keadaan seperti apa, karena yang diinginkan adalah sebisa mungkin kunjungan setiap hari Sabtu dan Minggu.

Mereka merasakan kunjungan hanya sekali dalam satu bulan, dan waktu tutup dari jam dua sampai jam tiga. Sementara anak-anak mereka pada jam-jam tersebut masih berada di sekolah, sehingga praktis tidak bisa bertemu dengan orang tuanya.

"Melihat kondisi itu, Pimpinan DPR meminta agar ditinjau kembali dan waktu kunjungan diubah menjadi pukul 4 sampai pukul 5 sore," ungkapnya.

Ditambahkan Fahri, mereka sudah terpisah dari orang tuanya dan tidak pernah bisa merasakan pelukan orang tuanya. Padahal semua orang mengharapkan hubungan orang tua dengan anak selalu dekat.

Anak-anak tidak bermasalah, yang bermasalah adalah orang tuanya. "Jadi anak janganlah dibawa dalam persoalan ini, biarlah orang tuanya yang bermasalah, tapi anak jangan," pungkas Fahri. (SPY,MP)/FOTO:JAKA/PARLE/HR

KETUA DPR BANGGA PADA PARLEMEN REMAJA 2015

Ketua DPR RI Setya Novanto mengutarakan rasa bangga kepada seluruh peserta Parlemen Remaja 2015, yang telah mengikuti pendidikan parlemen,

bertujuan meningkatkan pendidikan dan pemahaman politik bagi generasi muda.

"Ini (Parlemen Remaja) adalah remaja-remaja parlemen sangat memberi-

kan arti bagi kepentingan bangsa dan negara, karena ini mendidik mereka untuk mengetahui masalah-masalah politik, ekonomi, legislasi, anggaran

BULETIN PARLEMENTARIA

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dr.

Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH: Dra. Damayanti, MSi (Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI: Irfan, S.Sos, MMSI (Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR: M. Ibnu Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos; Ketut Sumerta, S. IP

ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos; Supriyanto;

Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati; Muhammad Husen; Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO: Eka Hindra

FOTOGRAFER: Rizka Arinindya; Naefuroji; M. Andri

Nurdriansyah; Yaserto Denus Saptoadji; Andi Muhamad; Jaka Nugraha

SIRKULASI: Abdul Kodir, SH, Bagus Mujiharjanto

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita



Ketua DPR RI Setya Novanto foto bersama peserta Parlemen Remaja 2015

dan pengawasan. Para remaja ini sangat berguna buat kepentingan berbangsa negara Indonesia ke depan,” kata Setya Novanto, Rabu (28/10/2015), di Gedung DPR RI.

Pelaksanaan Parlemen Remaja merupakan amanat dari *Inter-Parliamentary Union (IPU)* yang diselenggarakan oleh parlemen seluruh dunia, agar generasi muda bisa mengetahui dan menyadari

pentingnya proses berdemokrasi.

Parlemen Remaja 2015 dipilih dari yang mendaftar sebanyak 2.149 dari seluruh Indonesia dan akhirnya terpilih 136 pelajar setingkat SMA/SMK/MA yang terdiri 4 orang dari setiap provinsi.

Ketua DPR mengharapkan peserta Parlemen Remaja dapat memberikan kontribusi yang besar kepada teman-teman, sekolah, dan keluarganya bahwa parlemen ini merupakan suatu lembaga negara yang anggotanya dipilih lewat pemilu. Fungsi dan tugasnya diatur sesuai dengan kaidah-kaidah konstitusi dan bisa berjalan bersama pemerintah.

Melalui parlemen remaja inilah mereka mengetahui bahwa para wakil rakyat yang duduk di DPR mempunyai kewibawaan yang tinggi dan mempunyai tugas-tugas yang sangat berat.

“Diharapkan peserta Parlemen Remaja dapat menjelaskan kepada seluruh elemen masyarakat dan juga sekolahnya masing-masing,” tegas Setya Novanto.

(AS) FOTO: DENUS/PARLE/HR

Indonesia dan Malaysia Fokus pada Pemadaman Kebakaran Hutan

Semangat bersama-sama untuk memadamkan kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya, berkobar dalam pertemuan antara DPR dan Pemerintah Malaysia, Selasa (27/10/15). Pasalnya, akibat kebakaran hutan ini, menyebabkan asap menyebar hingga ke negara tetangga Indonesia.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah (F-PKS), yang saat itu memimpin pertemuan menyatakan rasa prihatin yang mendalam akibat bencana asap ini. Ia berharap, kerjasama dengan Malaysia bukan hanya ketika masalah itu sudah terjadi, namun ketika sebelum terjadi masalah. Karena ini masalah bersama.

Dalam pertemuan dengan Pemerintah Malaysia, Fahri didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Ketua Komisi IV Edhy Prabowo, Anggota Komisi VII Aryo Djojohadikusumo, dan Ketua BURT DPR, Roem Kono. Sementara dari Pemerintah Malaysia, diwakili Menteri Wilayah Persekutuan; Teuku Adnan, Menteri Mineral dan Environ-



Pimpinan DPR didampingi Pimpinan BURT dan Pimpinan Komisi saat menerima Menteri Wilayah Persekutuan, Menteri Mineral dan Environment dan Dubes Malaysia

ment; Wan Junaidi, dan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia.

“Kita terkesan tidak berdaya. Kami, DPR juga sudah bertemu dengan Presi-

den. Ini kebakaran wilayah gambut, sehingga api ada di dalam tanah. DPR akan melakukan investigasi secara menyeluruh,” kata Fahri, saat pertemuan.

Politikus asal dapil NTB itu menambahkan, karena kebakaran hutan dan lahan ini terjadi di lahan gambut, sehingga jika menggunakan pesawat *water bombing*, maka air harus disemprot sampai ke dalam. “Jika tidak, maka menjadi asap,” imbuhnya.

Sementara itu, Agus (F-PD) mengapresiasi pertemuan ini. Pasalnya, Pemerintah Indonesia, maupun Pemerintah Malaysia, sepakat untuk segera memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan, termasuk di wilayah lainnya. Pemerintah Malaysia juga akan membantu memadamkan lahan, khususnya lahan gambut, karena berbeda penanganannya, api berada di kedalaman tanah yang cukup dalam.

“Pemerintah Malaysia juga menawarkan kepada kami untuk melihat secara langsung alat pemadaman khusus kebakaran lahan gambut. Sementara, MoU antara Indonesia dengan Malaysia terkait asap, ini menjadi prioritas yang kedua. Utamanya adalah memadamkan api dan asap,” kata politikus asal dapil Jawa Tengah itu.

Masih dalam kesempatan yang sama, Edhy menyatakan tidak mudah dalam memadamkan kebakaran hutan ini. Pemerintah diminta lebih serius untuk menanganinya hal ini, sehingga permasalahan segera berhenti dan tidak terjadi lagi.

“Kami malu sebagai bangsa, karena Malaysia selalu kena imbasnya. Kita cari langkah bersama. Dan kami pun sudah turun langsung ke lokasi,” kata Edhy.

Tak dipungkiri, lanjut politikus F-Gerindra itu, Malaysia mendapat tekanan dari masyarakatnya, karena permasalah-

an asap ini yang sudah mengganggu masyarakat, seolah Pemerintah Malaysia tidak berbuat apa-apa.

“Sehingga mereka datang ke sini, untuk melakukan kunjungan dan mencari informasi apa yang bisa dibantu. Intinya, pertemuan ini dengan semangat kekeluargaan, dan Indonesia bersama Malaysia, bersama-sama berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan ini,” imbuh Edhy.

Politikus asal dapil Sumatera Selatan itu juga mengingatkan, sebagai negara tetangga, tentunya Indonesia dan Malaysia bisa bersama-sama menyelesaikan masalah ini.

“Semoga ini bukan pemicu terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan. Kita ingin selesaikan bersama,” tutur Edhy.

Menteri Wilayah Persekutuan, Teuku Adnan mengatakan, akibat adanya kebakaran hutan ini, menyebabkan lebih dari 4000 sekolah tutup, sehingga pelajar diliburkan.

“Kita pikirkan cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Adnan.

Sementara Menteri Mineral dan Environment, Wan Junaidi, mengatakan, bencana asap tahun ini merupakan bencana yang terparah. Ia mengakui, asap semakin berkurang akhir-akhir ini. Walaupun masih ada beberapa daerah yang masih memiliki indeks pencemaran udara tidak sehat.

“Asap semakin berkurang. Hanya ada beberapa wilayah yang dianggap tidak sehat. Kita akan bekerjasama dengan Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini,” imbuh Junaidi.

Pertemuan berlangsung dengan sangat bersahabat, dan diakhiri dengan pertukaran cinderamata. (SF) FOTO: IWAN ARMANIAS/PARLE/HR

PIMPINAN DPR PASTIKAN TIDAK ADA DEADLOCK PEMBAHASAN RAPBN 2016

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto memastikan, tidak ada *deadlock* atau kebuntuan dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Pasalnya, seharusnya RAPBN diketok pada 22 Oktober 2015 lalu, namun mundur menjadi 30 Oktober 2015.

Demikian dikatakan Agus, usai menerima Menteri Wilayah Persekutuan Malaysia, Teuku Adnan, di Gedung Nusantara III, Selasa (27/10/15). DPR dan Pemerintah Malaysia membahas masalah kebakaran hutan dan bencana asap.

“Memang seyogyanya RAPBN 2016 diketok pada 22 Oktober lalu. Namun persetujuan ini belum selesai, masih

dalam tahap pembahasan terus. Sehingga pembahasan terus dilanjutkan. Kita masih punya waktu hingga 30 Oktober nanti,” pasti Agus.

Politikus F-PD itu menambahkan, pembahasan RAPBN 2016 itu yang mengajukan Pemerintah, dan dibahas bersama DPR, dan disetujui bersama DPR dan Pemerintah. Tak dipungkiri, masih ada pembahasan yang belum selesai.

“Memang pembahasan belum selesai. Ada Penyertaan Modal Negara, dan lain sebagainya, dimana memang belum selesai pembahasannya,” imbuh Agus.

Untuk itu, tambah Politikus asal dapil Jawa Tengah itu, DPR dan Pemerintah harus bersatu padu, dan saling mem-



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

perkuat posisi, sehingga tanggal 30 Oktober, RAPBN 2016 bisa diketok.

“Untuk yang terbaik, bahwa ini diundur pembahasannya akhir masa sidang ini hingga 30 Oktober. Penundaan ini bukan sesuatu yang sangat krusial, karena kita untuk mencapai kesepakatan, dan untuk kebaikan APBN kita sendiri,” tutup Agus. (SF) FOTO: DENUS/PARLE/HR

KETUA DPR KUNJUNGI KORBAN KABUT ASAP DI JAMBI

Ketua DPR RI Setya Novanto memantau secara langsung kondisi terakhir kabut asap yang telah menyelimuti Provinsi Jambi dan sekitarnya dalam dua bulan terakhir. Dalam kunjungan tersebut ia berkesempatan menyapa masyarakat termasuk meninjau puskesmas yang banyak menerima penderita ISPA.



Pimpinan DPR didampingi Pimpinan Fraksi dan Komisi menggelar pertemuan dengan Pemerintah

“DPR mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan presiden dan para menteri untuk mengatasi segala permasalahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan yang terjadi di tanah air khususnya di Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Papua, meskipun harus kita akui masalah asap ini masih memerlukan penanganan yang lebih baik,” katanya disela-sela kunjungan, Selasa (27/10/15).

Sejumlah pejabat juga ikut dalam kunjungan ini yaitu Men-

kopolhukam, Menteri Kesehatan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Panglima TNI. Usai tiba di Bandara Jambi rombongan melaksanakan rapat tertutup di Posko Satgas Jambi bersama Gubernur Jambi, Pangdam II Sriwijaya, Kapolda Jambi serta sejumlah pejabat daerah lain.

Setya menekankan belajar pada kasus kebakaran hutan kali ini, ia meminta pemerintah dalam hal ini Kemenhut LH untuk tidak lagi mengeluarkan izin penggarapan lahan gambut. Wakil Rakyat dari dapil NTT ini juga memberikan catatan tentang proses belajar mengajar di sekolah yang terhenti akibat kabut asap.

“Kebijakan Kemendikbud yang memundurkan jadwal atau kalender pendidikan di daerah yang terkena bencana juga sangat saya apresiasi, karena anak-anak tidak perlu khawatir tertinggal dari teman-temannya yang lain, karena sistem dan waktu sekolah sudah dibuat fleksibel oleh pemerintah,” tutur dia.

Usai meninjau sejumlah lokasi dan berdialog dengan masyarakat, rombongan mendapat kejutan yang menyenangkan. Hujan yang sudah lama dinanti tiba-tiba turun. “Wah Ketua DPR datang, hujan turun nih,” kata Menkoplu-kam Luhut Panjaitan disambut tawa hangat hadirin. (IKY), FOTO : DENUS/PARLE/HR.

FADLI ZON TERIMA PIMPINAN PANSUS ANGKET PELINDO II

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di ruang pertemuan Pimpinan DPR, Selasa (27/10) menerima Pimpinan Pansus Angket Pelindo II terdiri Ketua Rieke Diah Pitaloka dan wakil-wakil Ketua Teguh Juwarno dan Desmon J. Mahesa. Konsultasi ini dimaksudkan untuk melaporkan hasil pertemuan dengan berbagai pihak yang telah diundang Pansus serta rencana kerja ke depan.

Menanggapi usulan Wakil Ketua Pansus Desmon J. Mahesa agar Pansus fokus pada masalah hukum, Fadli menyatakan perspektif itu sangat sah. Masalah hukum dan pengelolaan BUMN terkait masalah undang-undang, tetapi juga harus ditinjau oleh aspek lainnya.

Ia mengatakan, dengan Pansus Angket posisinya lebih kuat, lebih mengikat dan lebih dalam. Apalagi angket, sesuai undang-undang bisa berhenti hanya pada hak angket atau bisa lebih jauh dari itu. Saat ditanyakan, dibanding kasus Century yang ternyata tidak ada tindak lanjut secara hukum, Fadli Zon mengatakan tergantung kasus dan temuannya.

“Sekarang baru awal yakni proses penyelidikan. Nanti dilihat setelah proses penyelidikan, baru ada hasil dan kesimpulannya,” tukasnya.

Ketua Pansus Angket Pelindo II Rieke Diah Pitaloka menyatakan, agenda Rabu (28/10) adalah mengundang Menteri BUMN Rini Soemarno karena Pelindo adalah salah satu BUMN. Sebagai menteri tentu ada kebijakan dan rapat-rapatnya semuanya terbuka. Selain itu juga mengundang Menko Rizal Ramli dan yang bersangkutan sudah dikonfirmasi.

“Pansus Angket bukan menysasar orang-perorang. Kalau nanti dalam penyelidikan tidak ada yang terlibat maka kita ungkap tidak ada yang terlibat. Sebaliknya kalau dalam pro-



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berdialog dengan Wakil Ketua Pansus Angket Pelindo II Teguh Juwarno

ses penyelidikan dan bukti memperlihatkan orang-perorang, maka harus dinyatakan salah berdasarkan konstitusi,” ungkap Rieke

Meski demikian, katanya. DPR tidak punya wewenang mengeksekusi, tapi menyerahkan kepada aparat berwenang bila ada kasus hukum. Sementara laporan Pansus hanya dalam rapat paripurna. “Pansus akan mengusahakan ada hal yang seterang-terangnya,” katanya. (MP,JKI)/FOTO:JAKA/PARLE/HR

NILAI PEMERINTAH MINUS 5 DI TAHUN PERTAMA



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dan anggota Komisi I Effendi Simbolon

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan nilai minus lima, terkait setahun Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasalnya, dalam kurun waktu setahun ini, banyak hal yang mengecewakan. Banyak janji yang tidak dilaksanakan. Bahkan, ketika satu janji belum ditepati, sudah membuat janji baru lagi.

“Kalau menurut saya (nilainya) minus lima, itu saja sudah sangat bagus,” kata Fadli, usai menjadi pembicara dalam acara Diskusi Publik Setahun Joko Widodo - Jusuf Kalla, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Rabu (28/10/15).

Hadir juga dalam acara ini, Anggota Komisi I DPR Effendi MS Simbolon, Pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng, Pengamat Budaya Ridwan Saidi. Moderator acara oleh Amir Hamzah. Sebelum sesi diskusi dimulai, di dahului dengan peluncuran buku berjudul *Kisah Hidup Babe*, oleh Ridwan Saidi.

Fadli mengatakan, banyak janji Presiden yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk Pemerintah. Banyak permasalahan yang dihadapi, sehingga menjadi pertanyaan, apakah saat ini Indonesia sedang menuju kemakmuran atau kebangkrutan.

“Seorang pemimpin itu seharusnya, *sabdo pandito ratu*, apa yang diucapkan itu menjadi kenyataan. Kalau pemimpin itu ucapannya banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan, ini akan menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat,” imbuh politikus F-Gerindra itu.

Fadli khawatir, jika hal ini terus terjadi, maka akan terjadi *distrust* (ketidakpercayaan) dan *civil disobedience* (pembangkangan sipil). Masyarakat sudah tidak ada kepercayaan lagi kepada Pemerintah. bahkan, bisa terjadi pembangkangan sipil.

“Ini yang bisa terjadi ke depannya. Tentunya ini tidak bagus untuk Indonesia, tidak bagus dalam situasi ekonomi saat ini, dan tidak bagus juga terhadap politik kita,” tukasnya.

Untuk itu, lanjut politikus asal dapil Jawa Barat itu, seharusnya Presiden segera melakukan konsolidasi kepada jajaran Pemerintahannya sekarang. Dengan melihat dan mengevaluasi kabinet yang dipimpinnya, mencari atau membuat tim yang sekuat-kuatnya, terutama di bidang ekonomi dan hukum, sehingga akan muncul harapan keadaan semakin membaik.

“Sekarang saja antar menteri bisa *saut-sautan* dan saling kritik, itu menandakan Pemerintahan ini tidak solid. Pemerintahan ini tidak memiliki kepaduan dalam melihat sesuatu. Mereka saling berhadapan di muka publik. Itu bukan Kabinet Kerja, tapi kabinet berkelahi,” kritiknya.

Untuk itu ia menyarankan, seharusnya dapat dibuat suatu mekanisme internal, sehingga apa yang menjadi masalah internal, dapat diketahui apa yang harus dilakukan.

“Saya kira, kalau dilihat ini kan Kabinet Kerja, Kerja, dan Kerja, tapi apa hasilnya. Harusnya kan selain kerja cerdas, juga kerja keras,” tegasnya. (SF) FOTO: ANDI/PARLE/IW

PEMUDA DIMINTA IKUT ANDIL MEMBANGUN BANGSA

Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober para karyawan/karyawati Setjen DPR, MPR dan DPD menggelar upacara di halaman Setjen DPR Rabu (28/10) dengan Inspektur Upacara Sekjen DPD Sudarsono Hardjosoekarto. Adapun peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-87 ini bertema Revolusi Mental untuk Kebangkitan Pemuda Menuju Aksi “Satu Untuk Bumi”.

Pada upacara tersebut Sekjen DPD membacakan rancangan Sumpah Pemuda Jilid II yang dapat dimaknai

sebagai semangat inspirasi perubahan revolusi mental. Semangat itu bisa ditularkan kepada Kesekjenan DPR, agar dalam menyelenggarakan fungsi legislasi, pengawasan, penganggaran menjadi semakin baik kedepannya.

Sekjen DPR Winantuningtyastiti yang ditemui usai upacara tersebut menegaskan, tema Revolusi Mental tersebut harus dimaknai secara mendalam, sehingga setiap memperingati hari Sumpah Pemuda tidak hanya sekedar seremonial. Dalam hal ini, para pemuda juga harus ikut andil membangun bang-



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti

sa bersama baik dari segi pemikiran, tenaga, bekerja bahu membahu dengan

segala kemampuan masing-masing.

“Momen ini sangat penting, seiring dengan tuntutan dari reformasi 98. Semangat perjuangan itu harus terus diperbaharui,” ungkap Sekjen DPR yang akrab dipanggil Win.

Selanjutnya dia berharap generasi

pemuda juga harus terus berprestasi. Hal ini sudah terbukti dengan kegiatan Olimpiade tingkat dasar sampai menengah atas yang dimenangkan para putera-puteri bangsa Indonesia, tentu dalam hal ini harus di fasilitasi oleh pemerintah.

Upacara tersebut dihadiri tiga Sekjen MPR, DPR dan DPD serta para pejabat ketiga lembaga negara tersebut serta para karyawan/karyawati dan para karyawan Bank Mandiri, BRI dan BNI yang berkantor di Komplek Parlemen, Senayan. (JK,MP) FOTO: JAKA/PARLE/HR

TAK ADA GUNANYA INDONESIA BERGABUNG DENGAN TPP

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menolak rencana Presiden Joko Widodo bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP), saat orang nomor satu di Indonesia itu mengunjungi Amerika Serikat, awal pekan lalu. Fadli menilai, hal ini hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi negara-negara Anggota TPP.

“Menurut saya, TPP harus ditolak, karena tidak ada gunanya. Itu hanya akan menjadikan kita sebagai pasar bagi negara-negara anggota TPP. Saya kira, Presiden Joko Widodo keliru mengambil keputusan itu,” kata Fadli, usai Diskusi Publik Setahun Joko Widodo - Jusuf Kalla, di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Rabu (28/10/15).

Politikus F-Gerindra itu mengaku, tidak paham dengan pemikiran Presiden, yang berniat bergabung dengan TPP. Pasalnya, tidak ada jaminan, apakah dapat menguntungkan perekonomian Indonesia, atau tidak.

“Kalau kita kuat ekspornya, kita boleh bergabung dengan TPP. Tapi, apa yang bisa kita ekspor ke negara-negara pasifik itu atau negara anggota itu? Indonesia hanya akan menjadi pasar, bukan pemasok barang-barang kita, ke pasar mereka. Jadi itu merugikan,” imbuh politikus asal dapil Jawa Barat.

Sebagaimana diberitakan, pada konferensi pers bersama Presiden Obama di AS, Presiden Jokowi menuturkan niatnya untuk bergabung dengan Trans Pacific Partnership. Hingga saat ini sudah ada 12 negara-negara di Asia Pasifik yang tergabung, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Brunei, Chile, New Zealand, Singapura, Australia, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam.



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Sementara, syarat untuk bergabung dengan forum ini, diantaranya, penghapusan Daftar Negatif Investasi (DNI). Kedua, Trans Pacific Partnership juga mewajibkan anggotanya untuk menghapus segala fasilitas untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, persyaratan Trans Pacific Partnership untuk membuka proyek yang dibiayai oleh anggaran pemerintah untuk investor asing. (SF) FOTO: ANDI/PARLE/HR

Inisiator Pansus Karhutla Serahkan 171 Tanda Tangan ke Pimpinan DPR

Sebanyak 171 Anggota DPR RI dari delapan fraksi menandatangani inisiasi pembentukan Panitia Khusus Kebakaran Hutan dan Lahan. Tanda tangan yang sudah terkumpul, kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (F-PD), di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Rabu (28/10/15) sore.

Dokumen tanda tangan itu diantarakan langsung oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron (F-PD), Viva

Yoga Mauladi (F-PAN), dan Ibnu Mul-tazam (F-PKB), serta Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasludin (F-PKS). Menanggapi inisiatif ini, Agus akan segera memproses pengusulan pembentukan Pansus ini.

“Memang kami lihat bahwa ide ini sangat bagus dan kami Pimpinan DPR RI akan proses. Pada Kamis, (29/10/15), ada rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI dan akan saya sampaikan untuk dibaca di Rapat Paripurna DPR RI

tanggal 30 Oktober,” kata Agus.

Agus mengatakan, Pansus ini nantinya akan mengurai benang kusut, supaya pemadaman kebakaran dan menghentikan asap, sehingga dapat segera selesai. Termasuk dampak-dampak dari kebakaran itu, seperti kesehatan dan pendidikan.

“Pansus ini juga akan membantu Pemerintah, supaya dapat mengidentifikasi para pembakar hutan itu. Karena di dalam penegakan hukum, semua



Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menerima Pimpinan dan anggota Komisi IV terkait pembentukan Pansus Karhutla

harus diberikan sanksi,” tegas politikus asal dapil Jawa Tengah.

Sementara itu, Herman Khaeron menyatakan upaya Pemerintah sudah luar

biasa, kita juga memberikan apresiasi. Namun, DPR juga ingin memberikan dorongan, sehingga kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan asap itu, segera selesai.

“Pemerintah juga menyampaikan, pada tahun 2016 itu akan bebas kabut asap, dan merestorasi lahan gambut yang rusak. Bagaimana caranya? *Lha wong* anggaran tidak cukup,” kata Herman, memberikan alasan inisiasi Pansus ini.

Untuk itu, lanjut politikus asal dapil Jawa Barat itu, DPR tidak mau tinggal diam melihat kondisi ini. Sehingga, DPR akan memberikan langkah strategis, agar 43 juta masyarakat yang terdampak asap ada tindakan lebih konkrit dari Pemerintah.

“Dasar pemikiran pembentukan Pansus ini karena membantu pemerintah, bukan merongrong kewibawaan pemerintah. Selama tiga bulan lebih persoalan asap masih terjadi,” ungkap Viva Yoga Mauladi, menambahkan. (SF)

FOTO: DENUS/PARLE/HR



Anggota Komisi XI DPR Amir Uskara

Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat pada pekan lalu, dikabarkan berhasil meraih sejumlah rencana investasi Amerika Serikat di Indonesia. Dari info yang beredar, beberapa perusahaan asal Negara Paman Sam akan mengucurkan modal hingga US\$ 2,4 miliar.

Anggota Komisi XI DPR, Amir Uskara pun menyoroti hasil lawatan Presiden ke negara adidaya itu. Ia berharap, kunjungan orang nomor satu Indonesia ke luar negeri itu dapat memberi imbas positif terhadap perekonomian dalam negeri.

“Kalau lawatan kali ini benar-benar bisa menarik investasi hingga US\$ 2,4

INVESTASI AS HARUS DIPASTIKAN TEREALISASI

miliar dan bisa terealisasi, pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian kita. Tapi rencana investasi tersebut tentu masih perlu tindak lanjut dari Kementerian dan Lembaga terkait, agar betul-betul bisa terealisasi,” kata Amir, saat dikonfirmasi Parlemenaria melalui pesan singkat, Rabu (28/10/15).

Politisi F-PPP itu juga menilai, para investor itu melihat sisi peluang, potensi, kemudahan dan kepastian untuk berinvestasi di Indonesia. Sehingga, berminat menanamkan modalnya di Tanah Air.

“Saya yakin tidak ada maksud tertentu dari para pengusaha AS untuk melakukan investasi di Indonesia selain bisnis,” lanjut politikus asal dapil Sulawesi Selatan itu.

Mengutip pemberitaan di salah satu media nasional, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani, yang turut dalam rombongan kenegaraan sejak akhir pekan lalu mengatakan, dari jumlah investasi itu, terbesar ditujukan ke sektor makanan, minuman, dan tembakau dengan nilai US\$ 1 miliar.

Sementara dalam hilirisasi sektor

agro, AS akan menanam US\$ 750 juta, lalu US\$ 600 juta untuk kelistrikan, serta industri alat berat dan permesinan US\$ 12 juta.

“Untuk makanan, minuman, dan tembakau dalam bentuk perluasan investasi,” kata Franky.

Menurutnya, rencana investasi tersebut merupakan bagian dari kesempatan bisnis Indonesia-Amerika Serikat dengan total nilai US\$ 20 miliar. Data menyebutkan, investasi Amerika sejak beberapa tahun lalu terbesar memang di sektor pertambangan.

BKPM mencatat, dari 2010 hingga kuartal ketiga tahun ini, dari total investasi Amerika senilai US\$ 8 miliar, sebanyak US\$ 7,2 miliar atau 90 persen berada di pertambangan. Adapun realisasi investasi negara pada periode Januari hingga September 2015 mencapai US\$ 855 juta.

“Sedangkan sektor perdagangan dan reparasi sebesar US\$ 258 juta, makanan minuman US\$ 167 juta, alat angkut US\$ 142 juta, dan kimia serta farmasi US\$ 56 juta,” kata Franky. (SF)

FOTO: JAKA/PARLE/HR

KOMISI VIII DORONG BADAN WAKAF OPTIMALKAN PERAN

Komisi VIII DPR RI mendorong Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk meningkatkan kinerjanya, dan tidak tertutup kemungkinan juga akan merevisi UU.No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal tersebut terungkap saat Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan BWI, Rabu (28/10) di ruang rapat Komisi VIII DPR Jakarta.

“Badan Wakaf Indonesia menjadi sebuah aset kelembagaan umat yang masih tidur, padahal disini ada potensi besar yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan umat. Namun sayangnya BWI belum secara optimal menjalankan perannya,” jelas Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid.

Pada kesempatan itu Ketua BWI Maftuh Basyuni menjelaskan, ada beberapa permasalahan yang membuat BWI belum menjalankan perannya secara optimal. Diantaranya adalah belum lengkapnya aturan perwakafan di Indonesia. Undang-undang perwakaf-

an selama ini belum secara lengkap mengatur tentang wakaf seperti pembagian kewenangan, kebijakan, tugas pokok dan fungsi antara Kementerian Agama dan BWI.

“Selain perlu pembagian tugas yang jelas antara Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kemenag dan BWI, juga diperlukan anggaran operasional BWI yang layak dan memadai. Selama ini anggaran BWI masih relatif kecil dan tidak mencukupi. Juga adanya permasalahan lain yang terkait sengketa wakaf,” ungkap Maftuh.

Menanggapi hal itu Sodik usai memimpin rapat mengatakan bahwa Komisi VIII akan mempertimbangkan untuk pembentukan Panja (Panitia Kerja) Perwakafan, yang salah satunya akan merevisi Undang-undang no.41 tahun 2004 tentang Wakaf untuk memperkuat kelembagaan BWI.

“Sebenarnya, untuk penguatan kelembagaan ada yang perlu diatur dalam revisi UU Wakaf mendatang, namun ada juga yang bisa dioptimal-



Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid

kan dengan payung hukum yang sudah ada, seperti masalah sengketa tanah wakaf BWI dengan pihak lain, dimana pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Kemenag sudah bisa mengatasi hal itu. Untuk peningkatan anggaran BWI sejauh ini akan kami dorong mengingat tugas dan peran BWI yang cukup besar namun selama ini anggarannya sangat minim,” pungkas Politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini.

[AYU] FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

PARLEMEN REMAJA PELAJARI PROSES KERJA DEWAN



Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti bersama peserta Parlemen Remaja

Paserta Parlemen Remaja antusias mengikuti pelatihan yang diberikan dari Anggota DPR RI dan Sekretariat

Jenderal DPR RI, dengan tema ‘DPR Modern Dalam Demokrasi Indonesia’.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Wi-

nantuningtyastiti mengatakan kegiatan positif ini memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk bisa mempelajari proses kerja Dewan.

“Para peserta akan pelajari proses kerja kemudian simulasi praktek langsung bagaimana tidak mudahnya berperan sebagai Anggota Dewan,” kata Setjen DPR ini yang biasa disapa Win, usai membuka Parlemen Remaja 2015, di Wisma DPR, Cisarua, Bogor, Senin (26/10) lalu.

Ia sangat bangga atas antusiasme yang ditunjukkan oleh seluruh peserta. Menurutnya, ini adalah bukti dari perhatian generasi muda kepada DPR. Antusiasme yang tinggi itu membuktikan, bahwa partisipasi dan perhatian masyarakat terutama generasi muda kepada DPR tidak pernah surut.

Peserta Parlemen Remaja diharapkan dapat mengenal lebih dekat tentang DPR dan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya generasi muda kepada DPR.

“Ini tentu harapan dari DPR bisa menjadi penyambung jembatan dari DPR, untuk menyampaikan kepada generasi muda lain yang belum berkesempatan mengikuti program ini,” tuturnya. [AS]

FOTO: SINGGIIH/PARLE/HR



Anggota Komisi X DPR Asdi Narang

INDONESIA LAYAK MENJADI TUAN RUMAH PENYELENGGARAN MOTOGP 2017

masih terkendala tiga hal untuk melengkapi persyaratan yang diajukan Dorna, yakni kepastian hukum, dana dan kesiapan infrastruktur.

Namun terlepas dari berbagai persiapan yang harus dipersiapkan Indonesia, Anggota Komisi X DPR, Asdi Narang, mendukung penyelenggaraan MotoGP 2017. Ia menilai, Indonesia sudah layak menjadi tuan rumah balap motor bergengsi itu.

“Menurut saya, ini sangat baik jika sampai terlaksana pada tahun 2017. Dimana kalau MotoGP ini dilakukan di Indonesia, bisa meningkatkan pariwisata juga, karena turis asing akan berdatangan. Saya sangat mendukung,” kata Asdi, ketika dikonfirmasi Parlemen melalui telepon, Selasa (27/10/15).

Namun, Politikus F-PDI Perjuangan itu mengingatkan, persiapan ini harus dibahas bersama. Persiapan paling utama, yakni Sirkuit Sentul yang harus

direnovasi, perlu dibahas terlebih dahulu oleh Kemenpora, pengelola Sirkuit Sentul dan termasuk pihak-pihak yang berkepentingan.

“Apalagi, sirkuit ini juga sudah lama tidak dipakai untuk event internasional. Sekarang ini hanya nasional saja, perlu direnovasi dari kualitas aspal, panjang lintasan, agar sesuai dengan ketentuan internasional. Perlu dipikirkan juga darimana anggarannya,” imbuh Asdi.

Politikus asal dapil Kalimantan Tengah itu juga mengingatkan, sarana prasarana, baik yang di area dalam sirkuit, maupun area sirkuit Sentul juga harus segera dibenahi.

“Semua pihak harus benar-benar bekerjasama. Event ini harus terjadi di Indonesia. Kita harus punya track yang lebih memadai untuk acara ini,” tutup politikus yang juga adik dari mantan Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang itu. (SF), FOTO : JAKA/PARLE/HR.

DPR NILAI POSITIF LANGKAH JOKOWI PERSINGKAT KUNJUNGAN DI AS

Sejumlah legislator menilai keputusan Presiden Joko Widodo untuk mempersingkat kunjungan di Amerika Serikat sebagai langkah positif. Masalah kabut asap yang belum reda di sejumlah daerah serta agenda penting lainnya di dalam negeri, saat ini memerlukan atensi khusus dari presiden.

“Sikap Pak Jokowi itu patut dihargai sebagai pemimpin bangsa karena beliau menyadari penderitaan yang sedang dialami rakyatnya, terutama di kawasan yang saat ini masih diselimuti kabut asap,” kata anggota Komisi I Marinus Gea, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/10/15).

Jokowi membuat keputusan tersebut setelah mendapat laporan dari Menkopolkam tentang kondisi kabut asap

yang masih belum reda di sejumlah daerah. Setelah bertemu dengan Presiden AS Barack Obama, ia membatalkan agenda kunjungan ke San Fransisco dan segera kembali ke tanah air.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga menilai langkah Jokowi tersebut sebagai keputusan tepat. “Syukurlah, presiden mempercepat kembali ke Indonesia. Saya kira itu putusan yang tepat,” ujar dia menjawab pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu lebih jauh mengkritisi kunjungan ke Amerika Serikat tidak akan menghasilkan apa-apa dibanding masalah asap yang masih mengepung masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia. Ia juga mengingatkan agenda penting



Anggota Komisi I Marinus Gea

pengesahan RAPBN 2016 yang perlu perhatian presiden.

“Presiden tidak serius membahas APBN 2016, juga masalah asap. Kunjungan ke AS ini tidak akan ada dampaknya,” tekan dia. Menurutny kondisi saat ini serius, apabila RAPBN 2016 tidak disahkan dalam paripurna 30 Oktober nanti maka pemerintah terpaksa akan bekerja berdasarkan APBN 2015. (IKY), FOTO : ANDRI NURDIANSYAH/PARLE/HR.

Masyarakat Harus Sadar Paten

Banyaknya pencurian hak paten dan klaim negara lain atas kekayaan bangsa harus diantisipasi dengan perlindungan hukum. Masyarakat harus sadar bahwa paten sangat penting.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Pansus RUU Hak Paten DPR RI Risa Mariska di Makassar, Selasa (27/10). "Paten harus sudah jadi *mindset* masyarakat bahwa itu penting untuk melindungi haknya," kata Risa dalam pertemuan di Polda Sulawesi Selatan dengan jajaran Pemprov, Polda, dan akademisi Sulsel.

Persoalan di daerah, lanjut Ang-



Wakil Ketua Pansus RUU Hak Paten DPR RI Risa Mariska

gota F-PDI Perjuangan ini, sama saja. Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan paten sangat rendah. Di sinilah pentingnya sosialisasi yang masif kepada masyarakat.

Risa menambahkan, untuk memudahkan akses paten, birokrasinya memang harus disederhanakan. Dan desakan agar biaya paten digratiskan, memang perlu juga dilakukan. Pansus sendiri masih mendalami persoalan biaya pengurusan paten ini, bagaimana formulasi yang terbaik. (MH) FOTO: HUSEN/PARLE/HR

PEMROV SULSEL MINTA DESENTRALISASI HAK PATEN



Wakil Ketua Pansus Hak Paten Syarifuddin Suding

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berharap agar ada distribusi kewenangan bagi daerah untuk menerbitkan hak paten, terutama bagi produk-produk lokal.

Desentralisasi paten menjadi harapan ke depan agar para investor di daerah bisa lebih mudah mengurus paten dengan biaya yang juga terjangkau. Demikian terungkap dalam pertemuan tim Pansus Hak Paten dengan Pemprov dan Polda Sulsel di Makasar, Selasa (27/10).

Syarifuddin Suding (F-Hanura) Ketua Pansus yang memimpin tim ini, mendapat banyak masukan berharga untuk

merumuskan RUU revisi atas UU No.14/2001 tentang Hak Paten.

Selama ini, Pemprov Sulsel mengeluhkan sulitnya pengurusan hak paten yang dirasakan para investor di daerahnya. Apalagi banyak produk makanan lokal yang juga belum dipatenkan.

"Ada semangat untuk segera merevisi UU Paten yang sudah tidak bisa menjawab tantangan zaman ke depan. Perkembangan hukum dan masyarakat tidak bisa lagi ditampung dalam UU lama," ungkap Suding dalam pertemuan tersebut. RUU ini, lanjut Suding, merupakan inisiatif pemerintah. Dan Pansus sedang menyusun daftar inventaris masalah (DIM).

Suding mengatakan, banyak perdebatan menyangkut pasal-pasal dalam UU Paten yang kini masih berlaku. Baik Polda, Pemprov, Kanwil Kemenkum HAM, maupun akademisi mempersoalkan Pasal 157 UU Paten. Dalam pasal itu disebutkan, tindak pidana paten merupakan delik aduan.

Dengan delik aduan, Polri kelak bersikap pasif. Bila tidak ada pengaduan, mereka tidak bekerja. Untuk itu, perlu diubah menjadi delik formil atau delik biasa. Polisi bisa langsung bekerja, bila ada pelanggaran paten, betapa pun pemilik hak paten itu tidak mengetahui produknya diklaim pihak lain.

Tim Pansus yang ikut hadir ke Polda Sulsel, tempat pertemuan ini dilangsungkan adalah Nasir Djamil (F-PKS), Anas Thahir (F-PPP), Rohani Vanath (F-PKS), dan Risa Mariska (F-PDI Perjuangan). (MH) FOTO: HUSEN/PARLE/RAY

SELURUH FRAKSI KOMISI III SERAHKAN DIM RUU KUHP PADA PEMERINTAH

Rapat Kerja pertama antara Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM beragendakan penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-undang KUHP. Penyerahan dilakukan Ketua Komisi III Azis Syamsuddin kepada

Menkumham dalam raker di Gedung DPR, Senin (26/10) sore.

Azis Syamsuddin mengatakan, DIM tersebut selanjutnya akan dibahas bersama-sama antara Komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM.

Dijelaskan, jumlah DIM yang telah diinventarisir ada 2.394 yang terbagi dalam beberapa hal. Diantaranya DIM tentang substansi terdiri dari 847 DIM, tentang substansi baru ada 88 DIM. DIM yang berkaitan dengan meminta penjelasan ada 221, DIM tentang redaksional ada 73, dan DIM yang bersifat catatan ada 62 DIM.

Sedangkan DIM yang telah dinyatakan tetap sama dengan usulan-usulan pemerintah ada 1.103 DIM. Berdasarkan hal tersebut Komisi III DPR diminta persetujuan khususnya terhadap DIM yang bersifat tetap berjumlah 1.103 DIM.

“Karena sifatnya tetap, maka kita setuju dalam Rapat Kerja ini apabila dalam hal yang berkaitan dengan masalah-masalah DIM yang bersangkutan dengan substansi baru, redaksional, dan catatan-catatan dapat dibuka pada saat Raker,” tegas Azis.

Pada malam harinya Komisi III menugaskan Panitia Kerja untuk melakukan pembahasan dengan Menteri Hukum dan HAM. Selanjutnya untuk tingkat Pimpinan membahas hasil rapat Panja dilakukan setiap hari Senin sampai Kamis pada pukul 19.30 sampai dengan 22.30. Ditambahkan Azis, pembahasan di tingkat Panja bersifat substansi baru dan meminta penjelasan redaksional dan catatan. RUU ini diharapkan dapat



Pimpinan Komisi III DPR

diselesaikan pada waktu sesingkat-singkatnya yaitu pada bulan Februari atau Maret tahun depan. (SPY,MP).FOTO: NAEFUROJI/PARLE/OD

PEMERINTAH HARUS LAYANI KORBAN KARLAHUT DI DAERAH TERKENA ASAP



Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay

Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay berharap agar Pemerintah juga melayani para korban di luar daerah kebakaran lahan dan hutan (karlahut) yang juga terkena imbas dari Karlahut. Harus ada kebijakan agar semua korban akibat asap ditangani oleh pemerintah.

Saleh mengungkapkan asap yang ditimbulkan karlahut tersebut telah menyebar secara merata hampir di seluruh Sumatera dan Kalimantan. Akibatnya, asap tersebut telah menjadi sumber penyakit pernafasan yang mengancam kesehatan masyarakat.

“Kemarin saya mendatangi langsung beberapa kabupaten/

kota di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel). Asap yang ada di Tabagsel ini sudah hampir sama pekatnya dengan yang ada di daerah Karlahut,” ungkap Saleh.

Bahkan dilanjutkan Saleh, ia menemukan banyak pasien yang mengalami gangguan pernafasan. Termasuk, anak berusia 2 bulan yang harus dirawat dan dibantu pernafasannya dengan tabung oksigen. Ironisnya, ia juga menemukan kondisi dimana tidak sedikit korban asap yang tidak ditanggung oleh asuransi pemerintah. Ada juga yang terpaksa meninggalkan pekerjaannya karena harus dirawat.

Semestinya, mereka ini dibebaskan dari biaya pengobatan dan kebutuhan hidup keluarganya ditanggung oleh negara. Ini tidak berlebihan mengingat banyak kepala keluarga yang selama ini menghidupi mereka saat ini sedang dirawat di rumah-rumah sakit.

Ini artinya asap yang disebabkan Karlahut tidak hanya mengganggu masyarakat di sekitar lokasi kebakaran. Tetapi, telah menjadi bencana bagi masyarakat luas. Bahkan, bagi masyarakat yang tinggal jauh dari lokasi. Melihat hal itu, pihaknya mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah cepat menangani korban. Pemerintah tidak boleh hanya melayani para korban di daerah Karlahut. Tetapi, harus ada kebijakan agar semua korban akibat asap ditangani oleh pemerintah.

“Mestinya, pemerintah pusat bisa segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Harus ada arahan yang jelas dari pemerintah pusat. Selain itu, persediaan tabung-tabung oksigen harus diperbanyak. Termasuk memikirkan nasib masyarakat yang harus kehilangan penghasilan akibat sakit karena asap. Jangankan evakuasi, pembagian masker saja tidak ada. Pemerintah daerah di sini pun belum kelihatan memiliki agenda khusus terkait bencana asap ini. Sekolah-sekolah belum ada yang diliburkan,” pungkasnya kepada Parlemen. (AYU) FOTO: NAEFUROJI/PARLE/OD

HASIL FGD PERTANAHAN, MORATORIUM UU PERTANAHAN DIY



Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais saat menjadi moderator FGD Pertanian DIY

Adanya silang sengkaret pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terjadi belakangan ini, dimana tidak sedikit terjadi sengketa tanah antara masyarakat dan kesultanan dalam hal ini kraton. Itulah yang kemudian mendorong DPR untuk campur tangan membentuk Tim Pemantau perundangan.

“Sejatinya tidak hanya adanya sengketa tanah antara masyarakat dan Kraton, namun juga adanya silang sengkaret tata perundangan yang ada,” ungkap Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais dalam *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Pertanian di DIY yang digelar DPR RI pada Senin (26/10) di Senayan Jakarta.

Dijelaskan Hanafi yang ketika itu bertindak sebagai moderator, satu sisi daerah kesultanan dengan keistimewaannya yang menjadi bagian dari rezim undang-undang Peraturan daerah (UU Perda). Namun ketika bicara tentang pertanian, hal itu menjadi rezim Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dan ketika kedua rezim itu dibenturkan dalam satu UU Keistimewaan Daerah, pengimplementasinya di masyarakat menimbulkan masalah.

“Undang-undang Keistimewaan ini turunannya Undang-undang Perda dalam level daerah, namun selama ini belum ada Perda (peraturan daerah istimewa). Tetapi yang dijalankan Kraton atau Kesultanan sebagai subyek

hukum dalam UU Keistimewaan sudah masuk terlalu jauh melakukan pendataan, melakukan sertifikasi tanah, mengeluarkan peraturan gubernur dengan pertanian. Sementara payung hukumnya belum ada atau belum jelas. Hal inilah yang menimbulkan keresahan di masyarakat Yogya, dimana mereka sudah menempati, menghuni dan mengolah tanah sudah puluhan tahun dan turun temurun menjadi ragu, jangan-jangan sewaktu-waktu bisa ditarik atau dialih fungsikan,” papar Politisi dari Fraksi PAN ini.

Pada akhir FGD tersebut salah seorang pakar, Kus Sri Antoro yang menjadi narasumber dalam diskusi tersebut sempat memberi masukan untuk moratorium terlebih dahulu undang-undang pertanian di DIY. Hal tersebut pun diamini oleh narasumber lainnya seperti Ni'matul Huda, Ahmad Nashih Luthfi, Dianto Bachriadi serta anggota DPR yang menjadi Tim Pemantau.

“Moratorium atau penghentian Undang-undang pertanian di daerah istimewa itu sangat memungkinkan, sampai kemudian disinkronisasi dan diharmonisasi pertanahan dalam UU Keistimewaan dan UU PA itu selesai. Setelah payung hukumnya jelas dan Perda nya bisa dibuat, baru bisa dilaksanakan. Sehingga kegelisahan masyarakat Yogya akan tanahnya bisa tersalurkan,” pungkas Hanafi sambil berjanji akan membawa hasil FGD tersebut ke Komisi terkait, yakni Komisi II dan Badan Legislasi DPR untuk proses harmonisasi dan sinkronisasi. [AYU] FOTO: JAKA NUGRAHA/PARLE/OD

DPR APRESIASI KERJA SAMA RS DENGAN JASINDO



Tim kunspek BURT DPR kunjungi RS. Pantj Rapih Yogyakarta

DPR mengapresiasi kerjasama layanan rumah sakit yang bekerjasama dengan Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) di sejumlah daerah. DPR berharap kerjasama itu ditingkatkan dalam upaya pelayanan dan kenyamanan pasien khususnya dari anggota DPR dan keluarga.

Hal itu disampaikan Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Hamka B Kady kepada Parlemen saat memimpin rombongan BURT DPR dalam kunjungan kerjanya ke RS Pantj Rapih di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (26/0). Kunjungan kerja BURT DPR ke DIY dalam rangka meninjau rumah sakit yang menjadi mitra Jasindo.

“Seperti di RS Pantj Rapih ini, kondisinya sangat bagus, dan mudah-mudahan ke depan pelayanannya kepada pasien

khususnya terhadap anggota DPR dan keluarga bisa lebih cekatan dan lebih paripurna lagi. Kemudian dengan Jasindo saya berharap kerja sama ini berjalan dengan baik, masalah kelancaran dan pelayanannya bisa lebih diperhatikan lagi,” kata politisi dari Partai Golkar itu.

Hamka menilai kondisi RS Panti Rapih sudah sangat paripurna, bahkan pihaknya melihat kelengkapan teknologi

medis yang ada di rumah sakit tersebut sudah bersaing dengan rumah sakit yang ada di Jakarta.

“Bayangkan RS MMC saja tidak punya MRI (Magnetic Resonance Imaging) padahal itu RS di Jakarta. Nah ini (RS Panti Rapih-red) punya loh. Jadi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih, mudah-mudahan dapat dikembangkan lebih jauh, dan catatan saya buat Jasindo

rumah sakit yang seperti inilah yang nantinya menjadi rujukan anggota DPR,” katanya.

Dalam kunjungannya, BURT DPR ke Provinsi DIY diikuti sejumlah anggota BURT DPR diantaranya Anton Sukartono (Fraksi Partai Demokrat), Syaiful Bahri (Fraksi-PKB), Julian Gunhar (F-PDIP). (NT)

FOTO: NITA/PARLE/HR

DEWAN AKAN SAHKAN RUU TAPER A MARET 2016

Ketua Pansus RUU Taper (Tabungan Perumahan Rakyat) Yoseph Umar Hadi menegaskan, RUU inisiatif DPR RI ini terdiri dari 531 pasal dan 440-an pasal sudah disetujui oleh pemerintah, sehingga tinggal 20% lagi untuk dibahas. Seluruh fraksi DPR RI dan pemerintah mendukung, hanya tinggal menyempurnakan beberapa pasal secara substansial khususnya terkait dengan mekanisme pembiayaan, iuran karyawan, pekerja dan buruh yang akan memiliki rumah, akses perbankan dan sebagainya. Pada prinsipnya agar rakyat memiliki rumah demi hidup layak, sehat dan mampu untuk mendorong kecerdasan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Pada prinsipnya 10 fraksi DPR RI dan pemerintah mendukung segera disahkannya RUU Taper ini sebagai jaminan sekaligus kewajiban negara untuk memberikan rumah yang layak bagi rakyat. Di mana amanat konstitusi setiap warga negara harus mempunyai tempat tinggal yang layak. Karena itu sekitar 12 Maret 2016 mendatang akan selesai dan disahkan,” tegas Yoseph pada diskusi forum legislasi “RUU Taper” bersama Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PURR Maurin Sitorus dan pengamat perumahan dan tata ruang Yayat Supriyatna di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (26/10/2015).

Mengapa penting? Karena kata Yoseph, tidak ada artinya kedaulatan pangan jika rakyat belum memiliki rumah yang layak huni. Nantinya selain akan disupport dana APBN dan APBD perumahan rakyat ini juga berasal dari pekerja, buruh dan karyawan yang gajinya dibawah UMR (MBR), sehingga harus ada terobosan pemerintah untuk memenuhi perumahan rakyat tersebut. “Iuran pekerja sebesar 3,5 % itu sebagai *sharing* – berbagi antara pekerja 2,5 %, pengusaha 1 % dan subsidi pemerintah ½ persen. Itu sudah dilakukan oleh Singapura, Tiongkok, Brasil. Kalau ada 40 juta rakyat, maka jumlah dari iuran dan bunganya tentu akan besar, bahkan bisa mencapai Rp 1.500 triliun,” ujar politisi PDIP itu.



Ketua Pansus RUU Taper Yoseph Umar Hadi dalam acara Forum Legislasi

Dengan demikian menurut Yoseph, melalui UU ini maka orang kaya pun wajib membantu yang miskin. Khusus untuk masyarakat, pekerja, buruh dan karyawan bahwa uang yang ditabungkan itu tak akan pernah hilang. “UU ini bukan untuk mendukung liberalisasi atau pasar bebas perumahan yang berkembang dewasa ini, tapi sebaliknya untuk melindungi rakyat sesuai UU No.1 tahun 2011 tentang kepemilikan rumah yang layak,” pungkasnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PURR Maurin Sitorus menilai jika UU Taper ini sesuai dengan Pasal 28 H UUD

1945 bahwa setiap warga negara berhak memiliki rumah yang layak dan itu sebagai hak asasi manusia. UU No.11 tahun 2005 bahwa rumah itu sebagai kebutuhan dasar (PBB), dan UU No.20 tahun 2011 tentang rumah susun yang pembiayaannya dilakukan oleh pemerintah.

“Di mana terdapat 13,5 juta sampai 15 juta rakyat yang belum mempunyai rumah sendiri, 7,6 juta belum mempunyai rumah, dan 3,4 juta penghuni rumah tak layak serta se-

banyak 800 ribu orang tinggal di wilayah kumuh,” tegas Maurin.

Karena itu jika tanpa UU Taper ini menurut Maurin Sitorus, maka kondisinya akan makin buruk. Di mana hanya 64 dari 250-an juta orang yang memiliki rumah layak, dan sebanyak 80 % tidak memiliki rumah layak huni, inilah yang harus dibantu oleh pemerintah.

“Maka, dalam UU ini ada sanksi untuk pihak-pihak terkait termasuk Taper sendiri jika mengabaikan amanat UU ini. UU ini akan melibatkan Kemenkeu RI, Kemennaker RI, Kementerian PURR, Perumnas, Bank BTN, OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Tiongkok sudah berjalan selama 25 tahun berjalan baik, Singapura selain mengendalikan tanah negara 80 % maka lebih sukses untuk program rumah rakyat ini,” ungkap Maurin.

Maurin berpendapat, industri perumahan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan harus dikendalikan oleh pemerintah termasuk harga melalui UU ini dan aturan terkait, sehingga pemerintah mampu menjamin keterjangkauan harga rumah tersebut oleh rakyat. “Kalau BPJS itu tidak fokus dan sulit berhasil karena hanya sampingan setelah menangani kesehatan. Sehingga diperlukan UU perumahan tersendiri, yaitu UU Tapera,” ujarnya.

Sedangkan pengamat perumahan dan tata ruang Yayat Supriyatna, menegaskan RUU Tapera ini jangan sampai bersinggungan dengan institusi lain yang sudah menangani perumahan, baik tanah maupun rumah harus dikendalikan oleh negara seperti di Singapura, harus ada kewajiban peme-

rintah daerah khususnya terkait pembatasan pembangunan pertanahan, pekerja mandiri harus diperjelas, dananya bisa juga untuk merenovasi rumah bagi yang sudah mempunyai rumah, dan kalau karyawan dipecat oleh perusahaan maka tabungannya harus ada jaminan keamanan.

“Bagi pengembang besar ini pasti tidak menarik, karena tidak akan menguntungkan. Namun, masyarakat harus dipaksa untuk menabung agar mempunyai rumah yang layak demi masa depan keluarga dan anak-anaknya sebagai generasi masa depan bangsa. Juga RUU Tapera ini jangan terakumulasi-tumpang tindih dengan aturan yang lain,” pungkasnya. (SC)

FOTO: NAEFUROJI/PARLE/OD

PEMUDA WAJIB KAWAL REFORMASI

Pemuda wajib mengawal reformasi di Indonesia. Diharapkan pemuda juga dapat menjadi kaum kritis dan terhindar dari pengaruh negatif. Demikian harapan Anggota Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra, menanggapi Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober.

“Saya ingin bahwa pemuda kita harus mengawal reformasi, sebagaimana di awal dulu. Namun, sekarang saya kok melihat pemuda banyak berdiam, tidak sekritis kondisi di tahun-tahun yang lalu,” kata Sutan, ketika dikonfirmasi Parlemen melalui telepon, Rabu (28/10/15).

Politikus yang akrab dipanggil SAH ini juga menyayangkan kondisi pemuda saat ini. Apalagi Presiden Joko Widodo juga sudah menggiatkan tentang revolusi mental, namun Sutan melihat masih banyak pemuda yang terkena narkoba, tidak menyuarakan kritis terhadap kebijakan Pemerintah yang tidak pro rakyat.

“Saya melihat semangat pemuda ini kita kendor. Di tengah banyaknya persoalan bangsa dan negara, masalah ekonomi, hukum, asap, persepakbo- laan, dan masalah lainnya. Namun pemuda tidak mencerminkan pelopor,” kecewa Sutan.

Politikus F-Gerindra ini juga menginginkan pemuda Indonesia berprestasi dalam bidang pendidikan. Pelajar Indonesia, yang notabene merupakan pemuda, harus mempunyai nilai saing

dan prestasi, harus bisa memberikan *input* yang dapat meningkatkan mutu pendidikan Tanah Air.

“Jadi, jangan hanya berdiam diri di kampus atau sekolah, jangan hanya mendengar kata orang lain, tetapi pemuda harus punya inisiatif, dan menjadi lokomotif pendidikan yang berdaya saing. Karena bagaimanapun, pendidikan ini penting, yang akan berdampak pada kesejahteraan,” tegas Sutan.

Sutan juga menghimbau generasi muda, untuk menghindari narkoba. Pasalnya, narkoba ini bak mesin pembunuh, yang dapat membunuh karakter pemuda. Oleh karena itu, ia meminta, agar menjadi pemimpin dan menjadikan bangsa yang besar dan bermartabat, maka narkoba harus dijauhi.

“Narkoba ini bisa dikatakan setan. Narkoba menjauhkan kita dari agama. Pemuda harus tingkatkan dengan akidah, dan dasarnya adalah agama. Jika mendekatkan dari agama, akan jauh dari persoalan negatif. Narkoba itu kepanjangannya, negara akan runtuh, kalau orang buta agama,” imbu Sutan.

Untuk itu, di momentum Hari Sumpah Pemuda ini, Politikus asal dapil Jambi ini mengajak dan menghimbau kepada generasi muda, untuk mempersiapkan diri menjadi generasi pemimpin bangsa dan tidak terlepas dari karakter budaya. Pemuda merupakan jati diri yang berharga, sehingga harus sangat dibanggakan. Pemuda tidak boleh diam



Anggota Komisi X DPR, Sutan Adil Hendra

dan tidak kritis, namun harus aktif dalam menyuarakan kepentingan yang pro rakyat.

“Jadi, di momentum sumpah pemuda ini, saya menghimbau dan mengajak pemuda, bahwa pemuda harus benar-benar bangkit, dan pemuda kembali kepada hakekatnya yang sangat kritis, dan bukan orang yang bisa dibayar, bukan orang yang bisa di ninabobokan, hanya dengan kepentingan sesaat. Tetapi mereka harus betul-betul menjadi tulang punggung pengamanan bangsa dan negara, karena kondisi negara kita butuh pemuda yang cinta tanah air,” saran Sutan. (SF) FOTO: RIZKA/PARLE/HR

KOMISI II AKAN SELESAIKAN PERMASALAHAN HONORER PADA 2016

Komisi II DPR RI mendesak pemerintah menyelesaikan masalah honorer K2 maksimal tiga tahun. Pasalnya, pada 2019 merupakan tahun politik sehingga dikhawatirkan akan ada honorer K2 yang batal diangkat CPNS.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi



Tim Kunspek Komisi II DPR saat pertemuan dengan Pemprov Sulsel, di Makassar

Partai Gerindra Azikin Solthan mengatakan akan menyelesaikan masalah pengangkatan honorer K2 pada tahun 2016. “Kami di Komisi II akan membahas dengan Kemenpan dan BKN mendesak untuk menyelesaikan masalah honorer ini, dan tahun ini anggarannya sudah dikeluarkan untuk 2016, khusus untuk penyelesaian K2 di seluruh Indonesia,” tegas Azikin di sela-sela kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Pemprov Sulsel, di Makassar, Senin (26/10).

Dia mengatakan, para honorer adalah orang yang telah mengabdikan untuk negara, sayangnya mereka jarang tersentuh kebijakan yang mendukung.

Azikin yang merupakan salah satu anggota panitia kerja yang ditugaskan untuk berkunjung melihat dan memverifikasi jumlah honorer di kabupaten, provinsi, dan mencocokkan dengan data di Badan Kepegawaian Negara

(BKN).

“Kita verifikasi data yang ada di Kemenpan dan BKN, agar nanti setelah pengangkatan tidak ada penambahan lagi,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengatakan pengangkatan tersebut akan tergantung pada kemampuan keuangan negara.

“Kami dari DPR mendesak agar dapat dilakukan secepatnya, namun akan bergantung dengan kemampuan keuangan negara, sehingga mungkin akan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo menitipkan nasib pengangkatan para Honorer K2 Provinsi Sulsel pada Komisi II DPR RI.

“Kemajuan provinsi ini pastinya tidak terlepas dari peranan para pegawai honorer yang profesional,” kata Syahrul.

Lebih lanjut Syahrul berpendapat, tenaga honorer yang telah melakukan fungsinya dengan baik, harusnya diberi kelonggaran untuk pengangkatan. “Kami titip untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer,” ujar gubernur.

Di Sulsel sendiri, menurut Kepala Kantor BKN Regional IV Iwan Hermanto, saat ini terdapat 53.131 orang tenaga honorer. Sebanyak 13.418 diantaranya telah lulus, dan 10.031 orang telah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP). Sementara 39.713 orang lainnya hingga saat ini belum lulus.

Komisi II sepakat pengangkatan K2 secepatnya dituntaskan paling lambat tiga tahun. Meskipun *roadmap* pemerintah empat tahun, namun DPR akan mendesak dipercepat sebelum 2019.

(AND) FOTO : ANDRI/PARLE/HR

RS YANG BEKERJA SAMA DENGAN JASINDO DIMINTA DATA BASE SELURUH ANGGOTA DPR

DPR berharap rumah sakit yang melakukan kerjasama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) bisa memberikan *data base* secara lengkap khususnya data base 560 anggota DPR

jika di kemudian hari ada kondisi yang mengharuskan anggota DPR berobat ke rumah sakit tersebut.

“*Data base* ini penting karena jika DPR menghadapi situasi yang agak

darurat, kalau ada data basenya kan bisa cepat karena tidak melalui prosedur yang biasa,” kata anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Syaiful Bahri kepada Parlemenaria

usai melakukan pertemuan dengan direksi RS Panti Rapih di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (26/10).

Kunjungan kerja BURT DPR ke Provinsi DIY dalam rangka meninjau rumah sakit yang menjadi mitra dari Jasindo. Dalam kunjungannya, BURT DPR ke Provinsi DIY diikuti sejumlah anggota BURT DPR diantaranya, Hamka B Kady (Fraksi Partai Golkar, sekaligus Ketua Rombongan), Anton Sukartono (Fraksi Partai Demokrat) dan Julian Gunhar (F-PDIP).

Politisi dari PKB itu menilai RS Panti Rapih memiliki pelayanan yang baik dan telah memenuhi syarat untuk pasien khususnya dari kalangan anggota DPR dan keluarganya.

Sementara itu dalam pertemuan dengan direksi RS Panti Rapih, Anggota BURT DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono menanyakan



Anggota BURT DPR Syaiful Bahri

apakah ada anggota DPR yang berobat ke rumah sakit tersebut. Ia juga sempat menanyakan sistem pembayaran

termasuk tagihan rumah sakit yang akan diklaim ke PT Jasindo.

“Karena kalau tagihan dari pihak rumah sakit ke Jasindo tidak lancar tentu kami (DPR-red) pun yang mendapat masalahnya,” kata Anton.

Sementara itu Direktur Utama RS Panti Rapih, Tedy Janong mengungkapkan bahwa kerjasama dengan PT Jasindo selama ini tidak menemui hambatan. “Kalau ada hambatan, mungkin kami tidak akan memperpanjang MoU, tapi selama ini lancar-lancar saja, termasuk pembayaran dari Jasindo kepada kami,” kata Tedy.

Soal data base, Tedy mengaku pihak Jasindo belum memberikannya, namun Jasindo menurut Tedy sudah berjanji akan memberikan data base tersebut secepatnya. “Data base untuk anggota DPR baru hari ini Jasindo akan memberikan *data basenya* kepada kami,” ujarnya. (NT) FOTO: NITA/PARLE/HR

KESAN EKSPATRIAT; KUNJUNGI BOROBUDUR CUKUP SEKALI, BALI BERKALI-KALI

Mantan artis Krisna Mukti yang kini anggota Komisi X DPR mengisahkan pengalamannya mengajak ekspatriat mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Belum lama ini ia mengajak rekan-rekan ekspatriat dari Eropa, China dan Korea ke Borobudur dan hanya terkesan pada candinya saja yang mengagumkan. Mereka ingin tahu sejarahnya, siapa yang membangun dan kemudian foto-foto.

“Namun saat ditanya apakah akan mengunjungi Borobudur lagi, dijawab tidak. Sedangkan kalau ke Bali, bisa berkali-kali. Alasannya, Borobudur tidak ada café, dan tidak bisa kongkow-kongkow, sementara pulau dewata lengkap dengan selera wisman,” kata Krisna saat mengunjungi Borobudur bersama Tim Komisi X DPR belum lama ini.

Menurut politisi PKB ini, salah satu contoh para ekspatriat itu menginginkan suasana santai di kafe, minum dan ngobrol bisa berjam-jam. Mereka menyarankan, kenapa di Borobudur tidak dibuat kafe-kafe, seperti Mac Donald yang berciri khas Borobudur atau berciri khas Magelang yang disuguhkan dengan *taste* internasional seperti Bali.

“Di Bali juga hanya warung-warung biasa tetapi penjual dan pelayanannya ramah, mau ngobrol bisa sedikit bahasa Inggris. Penyajiannya juga dengan *taste* internasional. Kami juga ingin melihat keindahan sore Borobudur sambil ngopi, ngobrol melihat pemandangan sekitar. Atau malam-malam bisa ngobrol sampai larut malam sambil melihat keindahan candi, namun disini *nggak* ada,” tutur Krisna.

Selain itu, sambung dia, Borobudur kurang terasa tradisi Jawanya seperti Yogya atau ketika turis tiba di Bali. Ketika masuk bandarannya, suasana Bali saja sudah terasa. “Di Borobudur, suasananya tanggung, desa tidak, kota juga tidak. Mereka ke sini mau lihat keotentikan, keaslian *home stay* tapi kecewa rumah-rumah yang didatangi rumah biasa, tembok



Anggota Komisi X DPR Krisna Mukti

suasana Jawa khas jaman dulu tidak ada,” keluhnya.

Karena itu dia berharap Pemkab Magelang bisa lebih kreatif, inovatif mempunyai terobosan baru supaya orang mau datang lagi ke Borobudur tidak cuma sekali untuk seumur hidup. Selain itu perlu dibuat film promosi yang mudah di akses ke seluruh dunia sehingga bisa menggelitik turis mancanegara mengunjungi Borobudur dan destinasi wisata di Jateng lainnya. (MP) FOTO: MASTUR PRANTONO/PARLE/HR.

PEMERINTAH DIMINTA SELESAIKAN SENGKETA TANAH WAKAF



Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti

Anggota Komisi VIII DPR RI, Endang Maria Astuti berharap pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama membantu Badan wakaf Indonesia (BWI) menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa tanah dan bangunan yang selama ini dialaminya. Hal tersebut diungkapkan Endang usai RDP (Rapat dengar pendapat) Komisi VIII dengan BWI, Rabu (28/10) di ruang rapat Komisi VIII Jakarta.

“Dari paparan Ketua BWI tadi diketahui bahwa selama ini ada berbagai permasalahan yang dialami BWI, sehingga perannya terlihat kurang optimal. Selain permasalahan payung hukum yang belum jelas, di lapangan disebutkan pak Maftuh

tadi (Ketua BWI-red) BWI juga kerap mengalami berbagai permasalahan yakni terkait sengketa tanah antar Nazhir (pengelola wakaf), status tanah wakaf yang tidak ada sertifikatnya yang akhirnya membuat tanah wakaf hilang atau mengalami penyusutan, dan sebagainya. Hal ini tentu harus segera diselesaikan,” ujar Endang.

Diungkapkan Ketua BWI, permasalahan sengketa tanah ini disebabkan karena sertifikasi tanah wakaf yang tidak segera diurus sehingga ketika si pewakaf meninggal dunia dan keluarganya menggugat hal ini akan menjadi masalah, karena tidak disertai bukti-bukti tertulis. Sebut saja kasus sengketa tanah wakaf di Slipi Jakarta Barat dan tanah Masjid di Sarinah, Jakarta pusat.

“Menurut data dari Kementerian agama, sertifikasi tanah wakaf yang belum tuntas ada sekitar 146.966 Persil/lokasi, dan kami yakin masih banyak lagi tanah wakaf yang belum tuntas sertifikasinya. Sempat ada MoU antara Dewan Masjid dengan Menteri Agama dan Menteri Agraria untuk sertifikasi tanah wakaf tapi realisasinya belum ada. BWI sendiri tidak jarang dalam menyelesaikan sengketa itu melalui pengadilan, tentu itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit,” ungkap Maftuh.

Terkait hal itu Endang berharap agar pemerintah membantu BWI untuk proses sertifikasi tanah dan aset wakaf lainnya dengan merealisasikan MoU yang sudah dibuat. Tidak hanya itu BWI merupakan badan independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-undang No.41 Tahun 2004 untuk memajukan perwakafan di Indonesia, agar BWI dapat menjalankan perannya secara optimal Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini mempertimbangkan untuk meningkatkan anggaran BWI. [AYU] FOTO: NAEFUROJI/PARLE/HR

TAK CUKUP DIKEBIRI, PENJAHAT SEKS TERHADAP ANAK PERLU DIHUKUM MATI

Tingkat pelecehan seksual kepada anak-anak sudah pada tingkat mengkhawatirkan sehingga perlu usaha maksimal untuk bisa memperkecil peluang terjadi kasus itu. Pemerintah akan mengusahakan pemberatan hukuman dengan kebiri. Namun bagi politisi Gerindra Mohammad Syafii, jangan hanya dikebiri, tetapi perlu hukuman mati.

Hal itu ditegaskan anggota Komisi VIII DPR Mohammad Syafii sehubungan akan dijatuhkan sanksi kebiri bagi kejahatan seksual terhadap anak-anak. “Saya melihat lebih komprehensif karena orang melakukan tindak kekerasan



Anggota Komisi VIII DPR Mohammad Syafii

anak belum tentu hanya hasrat seksual. Bisa saja merupakan akumulasi dari pengalaman sendiri atau keluarganya sehingga apa yang dilakukan selain hasrat seks ada pelampiasan kemarahan balas dendam,” katanya Senin (26/10) di Jakarta.

Lebih jauh, politisi Dapil Sumut ini menyatakan, cenderung kejahatan seks pagar makan tanaman, harus ada pemberatan hukuman. Atau bila perlu hukuman mati sebab dalam Islam hukuman mati tidak dilarang. Bahkan merupakan perintah. “Diwajibkan atas kamu melakukan qisos terhadap pembunuh,” ujarnya mengutip salah satu

ayat Al-quran.

Menurutnya, pembunuh disini tidak langsung pembunuhan fisik. Anak-anak korban kekerasan seks terbunuh masa depannya, kemudian marah, emosi dendam sehingga tertutup masa depannya. Sama dengan kejahatan korupsi yang membunuh banyak peluang.

“Pelaku kekerasan seks terhadap anak, atau guru yang menggagahi muridnya harus dihukum mati. Mereka membunuh masa depan anak-anak, cita-cita. Karena kejahatan seks ini merupakan kejahatan baru,” katanya

lagi

Ia mengakui, dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi kebiri hingga kini belum ada dan direncanakan diterbitkan peraturan baru. “Dari pada menunggu hukum yang baru, mending hukuman mati saja,” katanya dengan menambahkan, beberapa negara telah mempraktikkan hukuman kebiri seperti Israel, Rusia dan Polandia.

Dalam kaitan ini perlu dipelajari juga terhadap negara yang sudah mempraktikkan itu bagaimana dampak terhadap kekerasan seks terhadap anak. “Kalau

efektif, nggak apa langsung dilakukan di Indonesia. Namun kalau kurang efektif, perlu kajian-kajian,” papar dia.

Sesuai data yang ada, Syaifi menyebutkan, kasus kejahatan seks terhadap anak tidak pernah menurun bahkan dari tahun ke tahun selalu naik dan tahun ini sudah mencapai 5.000 an kasus. “Ini luar biasa, kejahatan seks terhadap anak merupakan kejahatan setara bandar narkoba, koruptor kakap dan teroris yang layak dihukum mati,” tandas Syaifi. (MP), FOTO : RISKA ARININDYA/PARLE/HR.

SEBANYAK 136 PESERTA PARLEMEN REMAJA IKUTI PELATIHAN



Peserta Parlemen Remaja 2015

Sebanyak 136 orang peserta Parlemen Remaja 2015 hadir mengikuti pelatihan simulasi Rapat Kerja Kerja DPR RI, di Wisma DPR. Peserta merupakan siswa dari tingkat SMA/SMK/MA ini terpilih melalui seleksi yang ketat dari yang mendaftar hampir 2.000 orang.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

(Humas) Setjen DPR RI Syaiful, dengan rasa bangga menyambut kedatangan peserta parlemen remaja yang terpilih mewakili pelajar dari seluruh Indonesia.

“Saya atas nama Pimpinan DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI mengucapkan selamat datang. Kami merasa bangga bahwa para peserta ini sudah

mewakili seluruh Indonesia. Mulai hari ini adik-adik kami panggil yang terhormat Anggota Parlemen Remaja,” kata Syaiful, dihadapan peserta Parlemen Remaja 2015, Minggu (25/20/2015), di Cisarua Bogor.

Menurutnya, penghormatan ini bukan didapat dengan begitu saja, karena untuk menjadi peserta Parlemen Remaja merupakan perjuangan dari siswa dan melalui seleksi yang ketat.

Kegiatan ini dikemas berbeda dengan tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya hanya membahas Undang-Undang di tingkat paripurna. Sekarang ini para anggota parlemen remaja yang terhormat akan dibawa kunjungan kerja langsung.

“Kunjungan Kerja ke lapangan ini akan terbagi dengan 3 kelompok, pertanyaan-pertanyaan yang selama ini dilakukan anggota dewan kini akan dilakukan oleh Anggota Parlemen Remaja,” paparnya.

Kemudian, Syaiful mengharapkan kepada Anggota Parlemen Remaja yang terhormat menjalankan seluruh program kegiatan dengan tertib dan disiplin. (AS), FOTO : AGUNG, SINGGIH/PARLE/HR.

KOMISI XI SETUJUI ANGGARAN EMPAT MITRA KERJANYA

Komisi XI DPR menyetujui anggaran empat mitranya untuk tahun anggaran 2016. Untuk Kementerian Keuangan, disetujui sebesar Rp 39,278 triliun, setelah mendapat pemotongan sebesar

Rp 1,221 triliun, dari sebelumnya yang diajukan sebesar Rp 40,499 triliun.

Berikutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari usulan sebesar Rp 3,6 triliun, disepakati menjadi Rp 3,471

triliun, setelah mendapat potongan Rp 129 miliar. Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) dari usulan Rp 5,6 triliun, dipotong Rp 217 miliar menjadi Rp 5,4 triliun.

“Untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dipotong Rp 45,2 miliar, dari Rp 1,678 triliun menjadi 1,663,4 triliun,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan, saat membacakan kesimpulan raker, di Gedung Nusantara I, Jumat (23/10/15).

Ditemui usai raker, Marwan menyatakan, pemotongan anggaran ini sebagai dampak dari perubahan asumsi dasar pembahasan APBN 2016 yang telah disepakati antara Komisi XI dan Pemerintah. Target pertumbuhan ekonomi, yang semula diusulkan oleh Pemerintah sebesar 5,5 persen, karena dipandang tidak realistis, kemudian disepakati sebesar 5,3 persen.

“Ini dampak langsungnya kepada penerimaan negara. Tentu dengan penerimaan negara yang turun, jika kita tidak ingin memperlebar defisit, belanja harus kita kurangi. Dampaknya adalah mitra kerja Komisi XI yakni 1 kementerian dan 3 lembaga, harus melakukan pemotongan anggaran,” jelas Marwan.



Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan

Politikus F-PD ini menambahkan, walaupun mitra kerjanya mendapat pemotongan anggaran, namun dapat mengajukan kembali pada APBN-Perubahan 2016. Namun, jika pun tidak diusulkan, hal itu pun tidak menjadi masalah, karena merupakan hak Pemerintah.

“Saya rasa pemotongan anggaran ini tidak akan mempengaruhi kinerja mitra kerja kami. Karena setelah kita pelajari, apa yang kita potong anggaran ini, memang masih bisa dilaksanakan pada akhir tahun mendatang,” yakin Marwan.

Terkait kinerja di tahun mendatang, Politikus asal dapil Lampung itu mendorong agar Kemenkeu dapat lebih fokus kepada penerimaan negara. Soal serapan anggaran Kementerian dan Lembaga pun tak kalah penting untuk menjadi perhatian. Pasalnya, hal ini juga berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi juga.

“Untuk BPS, permasalahan utamanya adalah validasi data. Kadang, data yang disajikan dengan kondisi di lapangan sangatlah berbeda. Ketidaksinkronan ini, membuat kita ingin melihat kondisi sebenarnya di lapangan,” tutup Marwan, sekaligus memastikan hasil rapat ini akan segera di bawa ke Badan Anggaran DPR. [SF] FOTO:NAEFUROJI/PARLE/RAY

SEKJEN DPR BERPERAN AKTIF DALAM PERTEMUAN ASGPDI JENEWA-SWISS

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Winantuningtyastiti menghadiri Pertemuan Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) yang berlangsung pada tanggal 18–21 Oktober 2015 di Jenewa, Swiss. Acara ini diselenggarakan bersamaan dengan konferensi *The 133th Assembly of the Inter-Parliamentary Union (IPU) and Its Related Meetings*. Sekjen DPR adalah anggota Executive Committee ASGP untuk periode 2014–2017.

Sidang ASGP di Jenewa tahun 2015 ini membahas tiga tema *general debate*, yaitu komposisi latar belakang sosial anggota parlemen; pencegahan konflik kepentingan di parlemen; dan dampak dari pemilihan langsung ketua komisi.

Selain itu, dibahas pula topik-topik lain yang merupakan *sharing* pengalaman dan *best practices* dari beberapa Setjen parlemen peserta sidang yang membahas tema besar, yaitu infra struktur, perkembangan terkini dari parlemen negara-negara anggota ASGP, dan Legislasi. Sidang ASGP tersebut menghasilkan *Minutes of the ASGP Meetings*.

Dalam sesi-sesi diskusi dalam sidang ASGP tersebut Sekjen DPR menyampaikan antara lain yang terkait dengan Ge-



Pertemuan Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) di Jenewa

dung parlemen merupakan salah satu bangunan Negara yang harus dapat diakses secara mudah bagi masyarakat untuk datang dan menyaksikan proses-proses kerja DPR, sebagai pusat pembelajaran sejarah demokrasi dan keparlemen serta tempat untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya secara baik.

Oleh karenanya saat ini Parlemen Indonesia sedang merencanakan pembangunan fasilitas khusus bagi masyarakat yang dinamakan “alun-alun demokrasi, museum, pusat riset dan perpustakaan. Namun untuk hal ini DPR masih menghadapi resistensi dari publik. Maka DPR terus berupaya melaksanakan berbagai kegiatan un-

tuk mengajak masyarakat membangun fasilitas bersama yang akan bermanfaat tidak saja bagi DPR tetapi juga bagi masyarakat.

Terkait dengan semangat membentuk parlemen terbuka yaitu dengan mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas parlemen melalui peningkatan informasi berbasis IT, Sekjen DPR mengingatkan perlunya membangun sistem keamanan fisik maupun keamanan informasi melalui regulasi.

Dengan demikian masyarakat yang datang maupun yang tidak berkesempatan datang langsung ke gedung DPR dapat mengetahui proses-proses kerja dan hasil kerja yang terjadi di Parlemen

melalui sarana teknologi informasi dan fasilitas yang baik. Beberapa hal yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal Parlemen Indonesia terkait

dengan aksesibilitas masyarakat untuk mengetahui proses kerja di Parlemen Indonesia, yaitu: Website, Video tron, TV Parlemen, Majalah Parlementaria,

Kerjasama TV Swasta, Media cetak dan juga Media Sosial. (BKSAP,MPI FOTO:DOK/PARLE/RAY

PELAKU UKM SULIT AKSES MODAL

Komisi VI DPR RI mengunjungi pelaku usaha Batik Allusnan di Jodog Sumberadi Mlati, Sleman, Yogyakarta, Jum'at (23/10'2015) lalu. Pada kunjungan ini Komisi VI menjumpai masih banyak pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kesulitan mengakses modal.

Salah satu untuk mengatasinya, Komisi VI telah menyetujui pemberian penyertaan modal ke Permodalan Nasional Madani (PNM) agar mudah diakses pelaku UKM.

Anggota Komisi VI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (F-PKB), menjelaskan pelaku UKM yang baru tumbuh ternyata masih sulit mengakses perbankan. Padahal pelaku UKM sangat membutuhkan modal untuk berkembang.

"Makanya dalam APBN Perubahan 2015 kami tambahkan penyertaan mo-



Anggota Komisi VI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz

dal ke PNM selaku BUMN sebesar Rp 1 Triliyun," ujar Eem panggilan akrabnya. Ia berharap UKM yang belum bisa

disentuh perbankan dapat dijumpai dari PNM.

Selain itu, dalam evaluasi dan pantauan di lapangan Komisi VI juga mempertanyakan bunga pinjaman yang dinilai terlalu tinggi. Jika nanti PNM bisa menurunkan bunga pinjaman, pihaknya akan berusaha menambah modal lagi.

Sementara Direktur Bisnis Mikro I PNM, Carolina Dina Rusdiana, menjelaskan tingginya bunga ini karena ada pelatihan bagi pelaku UKM. Dengan pelatihan ini agar pelaku UKM lebih mandiri, kreatif dan berkembang.

"Pelatihan itu kami selenggarakan dengan gratis. Hal ini yang membedakan kami dengan perbankan. Selain diberikan pinjaman modal, pelaku usaha juga diberikan pelatihan," jelasnya. (IWI/

FOTO:NAEFUROJI/PARLE/HR

KORPRI SETJEN DPR RI SOSIALISASI PENGUMPULAN SWADANA



Ketua Dewan Pengurus KORPRI Setjen DPR Mardian Umar didampingi pengurus KORPRI

Terkait dengan telah disetujuinya pengumpulan swadana dari dan untuk Anggota KORPRI oleh Pembina KORPRI Sekretariat Jenderal DPR RI dalam hal ini Sekretaris Jenderal DPR RI, Dewan Pengurus KORPRI Sekretariat Jenderal DPR RI melakukan sosialisasi terhadap pengumpulan swadana tersebut pada Jumat (23/10/2015) di Ruang Pansus B, Gedung DPR RI, Jakarta.

Dalam acara sosialisasi ini dihadiri Dewan Pengurus KOR-

PRI dan perwakilan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Menurut Ketua Dewan Pengurus KORPRI Setjen DPR RI Mardian Umar yang membuka acara tersebut, KORPRI merupakan satu-satunya wadah bagi PNS di Setjen DPR RI maupun di seluruh Indonesia. Tidak ada lagi organisasi selain KORPRI, ada banyak organisasi-organisasi di luar, tetapi bukan organisasi yang resmi.

Ia menjelaskan, bahwa salah satu persoalan utama dalam mengelola KORPRI khususnya di Setjen DPR RI adalah sumber pendapatan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan, baik di bidang olahraga, kesenian, kerohanian dan sosial.

"Semenjak penugasan sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI, saya sudah menunjuk beberapa orang untuk duduk menjadi pengurus KORPRI Setjen DPR RI. Banyak hal yang mungkin akan dilakukan KORPRI Setjen DPR RI, namun organisasi ini belum memiliki dana," paparnya.

"Kiranya pertemuan kali ini dalam rangka membahas tentang pengumpulan swadana dari dan untuk Anggota KORPRI dalam rangka membantu organisasi yang kita cintai ini untuk bisa bergerak agar bisa memperhatikan, mengayomi dan mengajak serta anggotanya untuk berpartisipasi," tambah Mardian.

Dalam kesempatan tersebut, Mardian menyampaikan bahwa besaran pemotongan swadana sudah disetujui Pejabat Eselon I dan II di Setjen DPR RI. Harapannya, setelah sosialisasi yang dihadiri perwakilan-perwakilan staf di lingkungan

Setjen DPR RI dapat menyampaikan kepada rekan-rekan di ruang lingkup kerjanya masing-masing.

Besaran terendah dalam pengumpulan swadana KORPRI Setjen DPR RI adalah sebesar Rp 25.000,- bagi pegawai pada Jabatan Fungsional 3-5, dan tertinggi sebesar Rp 200.000,- bagi Jabatan Pimpinan Madya (Esselon I) atau Sekjen DPR RI.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa besaran

pengumpulan swadana tersebut hanya berlaku sampai dengan Desember 2015 dengan beberapa catatan masukan dari peserta rapat hari ini. Besaran pengumpulan swadana untuk tahun 2016 akan ditentukan dan dibahas dalam Rapat Anggota KORPRI yang waktu dan tempatnya akan ditentukan kembali. (SC), FOTO : ANDRI/PARLE/HR.

PAKET KEBIJAKAN TIDAK PENGARUHI PERUBAHAN EKONOMI

Paket kebijakan ekonomi pemerintah yang digulirkan hingga jilid keempat, ternyata tidak membawa pengaruh bagi perubahan ekonomi nasional. Dikeluarkannya paket tersebut justru mengindikasikan bahwa pemerintah tidak memiliki tim ekonomi yang bagus.

Demikian penegasan Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (F-Gerindra) di ruang kerjanya, Kamis (22/10). "Paket kebijakan tidak berpengaruh. Ekonomi rakyat juga tidak menggeliat. Harusnya paket ekonomi sudah jauh-jauh hari dilaksanakan saat pertama kali memerintah. Bukan sepotong-sepotong seperti ini," tegas Bambang.

Bambang justru mengkritik tajam empat paket kebijakan yang sudah dirilis pemerintah. Menurut politisi dari dapil Jatim I ini, paket tersebut hanya untuk coba-coba. Harusnya sebuah paket kebijakan dianalisa dahulu dan dipantau setidaknya tiga bulan sekali. Setelah itu akan terlihat tingkat keberhasilan dari kebijakan yang dikeluarkan.

Misalnya, kata Bambang, penurunan bunga KUR dalam paket kebijakan jilid IV, diturunkan dari 22 persen menjadi 12 persen. "Itu masih terlalu tinggi. Mestinya pelaku UKM bisa menerima sepertiga bunga dari bunga komersial atau sekitar empat persen saja, jauh dari bunga komersial," ungkap Bambang. Para pelaku UKM harus mendapat



Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono

perhatian utama dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah daripada memberi perhatian lebih kepada para investor asing.

Begitu juga dalam paket kebijakan jilid II ada kemudahan perizinan investasi dari sebelumnya harus berhari-hari mengurus izin, kini menjadi tiga jam saja. Menurut Bambang, itu tidak realistis. Membangun investasi di Indonesia butuh waktu panjang, tidak bisa dalam sekejap mata. Justru dengan kebijakan mempercepat pengurusan izin, dikhawatirkan tidak ada selektivitas yang tinggi dalam mengontrol dan mengawasi para investor asing yang masuk.

Pemerintah terkesan memanjakan investor asing daripada para pelaku UKM di dalam negeri. Mempercepat atau mempermudah izin usaha dan investasi sebenarnya sudah tugas pemerintah yang tak perlu dituangkan secara khusus dalam paket kebijakan. "Kalau pemerintah tidak melakukan itu, berarti pemerintah tidak mau melakukan perubahan," ucap Bambang lagi.

Ditambahkannya, paket kebijakan yang harus dirumuskan pemerintah mesti membumi dan betul-betul berdampak pada perkonomian nasional. Sampai sekarang belum terlihat dampak dari paket kebijakan tersebut. Soal menguatnya nilai tukar rupiah, sambung Bambang, itu bukan dari dampak paket kebijakan, Bambang malah mencurigai, menguatnya rupiah dalam waktu singkat itu merupakan capaian yang penuh rekayasa.

"Penurunan dolar yang drastis justru mencurigakan dan bahkan penipuan. Malah pengusaha-pengusaha kita jadi tidak menentu melihat nilai kurs ini yang sebenarnya berapa sih. Sekarang terlihat mulai melemah lagi. Jadi, paket kebijakan I-IV tidak *ngefek* ke ekonomi kita. Saya tidak melihat ada gejala ekonomi yang menggeliat di masyarakat. Bahkan masyarakat sudah antipati terhadap kebijakan pemerintah yang kurang realistis dan sulit diaplikasikan."

(MH), FOTO : NAEFUROJI/PARLE/HR.

TAHUN 2016, 49.443 TENAGA KESEHATAN PTT DIANGKAT JADI PNS

Pada tahun 2016 sebanyak 49.443 tenaga kesehatan PTT (Pegawai Tidak Tetap) akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Ini merupakan kesepakatan yang dicapai Komisi IX DPR dengan Kementerian Kesehatan.

Berita yang membahagiakan bagi para PTT kesehatan ini diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso (dapil Jateng III) di ruang kerjanya, Kamis (22/10). Imam mengaku, desakan untuk mengangkat PTT kesehatan

menjadi PNS merupakan inisiatif dirinya saat mengikuti rapat kerja dengan Menkes beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, Imam berhasil meyakinkan Menkes agar membuat pernyataan resmi bahwa PTT kesehatan

bisa jadi PNS tahun depan.

“Waktu bahas anggaran di Komisi IX, saya didukung Pimpinan Komisi IX berhasil mendesak Menkes agar 49.443 PTT diangkat jadi PNS. Mereka yang diangkat PNS itu terdiri dari bidan PTT 42.245, dokter PTT 1.984, dokter gigi PTT 904, dan tenaga Tim Nusantara Sehat sebanyak 4.310 orang,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.

Hanya saja, lanjut Imam, sempat ada ganjalan dari Kementerian PAN dan RB yang tidak bisa mengangkat semua PTT kesehatan jadi PNS. Data dari Kemen PAN hanya menyetujui sekitar 16 ribu PTT saja yang akan diangkat. Imam sendiri mengatakan, sudah meminta dukungan dari Komisi II DPR dan Kemen PAN untuk mengangkat PTT kesehatan tersebut sesuai data yang dimiliki

Komisi IX dan Kemenkes.

Menurut Imam, PTT kesehatan sangat pantas diangkat sebagai PNS, terutama para bidan yang bekerja di pelosok desa. Kerja mereka, lanjut Imam, telah menolong banyak ibu hamil dan bayi dari ancaman kematian. Pengangkatan ini sekaligus menjadi penghargaan atas jasa dan jerih payah mereka membantu masyarakat desa. Gaji para PTT kesehatan rata-rata di bawah UMR. Ini sangat memprihatinkan.

“Bila semua data PTT kesehatan itu diangkat jadi PNS, itu akan membahagiakan mereka. Sebaliknya, bila hanya 16 ribu saja yang diangkat seperti dirilis Kemen PAN, itu akan menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan PTT kesehatan. Ini berbahaya, karena mereka menangani keselamatan jiwa ibu



Anggota Komisi IX DPR Imam Suroso

hamil dan bayi,” tutur Imam menutup perbincangan. (MH), FOTO : JAKA NUGRAHA/PARLE/HR.

MUNCUL WACANA REVISI TERBATAS UU ASN



Wakil Ketua Komisi II DPR Mustafa Kamal

Komisi II DPR RI mewacanakan revisi terbatas terhadap Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait banyaknya kelemahan dalam kebijakan penilaian dan lelang jabatan.

“Adanya Peraturan Pemerintah yang melakuan lelang jabatan, kasihan orang yang sudah lama meniti karir dari bawah. Tidak bisa mengisi posisi pada suatu jabatan,” kata Mustafa Kamal saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Sulawesi Selatan. Komisi II, kata dia, akan

mendorong revisi terbatas terhadap UU ASN terkait banyaknya keluhan mengenai lelang jabatan ini.

Komentar pedas datang dari anggota Komisi II DPR-RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan, bahwa kebijakan lelang jabatan yang saat ini dilaksanakan adalah ilegal. “Menurut saya, kebijakan mengenai lelang jabatan ini ilegal,” katanya.

Dia mengatakan, daerah punya hak otonomi masing-masing, sesuai dengan prinsip desentralisasi otonomi daerah.

Anggota Komisi II lainnya, Azikin Solthan dari Fraksi Gerindra menambahkan hingga saat ini lelang jabatan belum ditopang oleh undang-undang namun baru sebatas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo pada beberapa kesempatan mengeluhkan proses lelang jabatan yang dianggap cukup menyita waktu.

Belum lagi proses untuk menentukan pejabat teras yang akan menduduki posisi strategis instansi mengabaikan penilaian kinerja seorang aparat sipil yang dirangkum dalam DP3.

“Dengan lelang jabatan, semua penilaian itu tidak ada gunanya,” kata Syahrul.

Dia berharap lelang jabatan bisa diatur lebih baik termasuk meninjau ulang jabatan spesifik apa saja yang perlu dilelang. Selain itu, tambahnya, ada juga jabatan-jabatan yang tidak perlu melalui mekanisme lelang.

Dengan tegas Syahrul mengatakan untuk jabatan tertentu “Cukup melalui proses Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) saja,” dengan begitu kita bisa tahu kemampuan dan kinerja yang sudah dilakukan pegawai tersebut. (ANDRI), FOTO : ANDRI/PARLE/HR.



Ketua DPR RI Setya Novanto memukul gong pembukaan Parlemen Remaja 2015, Rabu (28/10)
Foto : Denus/Parle/HR



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima demonstran 1 tahun Jokowi-JK di depan Gedung DPR RI Senayan, Rabu (28/10) Foto : Andi Muhamad/Parle/HR



Anggota Panja BPJS Komisi IX DPR RI Marwan Dasopan berdialog dengan sejumlah pemangku kepentingan terkait layanan BPJS Kesehatan di Padang, Sumbar, Rabu (21/10)
Foto : Ibnur Khalid/ Parle/HR



Tim Kunjungan Kerja Panja BPJS DPR RI berdialog dengan pasien RSJ Saanin di Padang, Sumbar, Rabu (21/10)
Foto : Ibnur Khalid/ Parle/HR